



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

juanda@umm.ac.id

DOI: [10.22219/jrak.v13i1.25539](https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1.25539)

Citation:

Setyawan, S., Juanda, A., Inata, L, C. (2023). Peran Government Financial Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Kesiapan Adopsi Paripurna International Public Sector Accounting Standards. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Kenangan*, 13(1), 83 - 96.

Article Process

Submitted:

March 22, 2023

Reviewed:

April 5, 2023

Revised:

April 18, 2023

Accepted:

April 28, 2023

Published:

April 30, 2023

Office:

Department of Accounting
University of
Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

PERAN *GOVERNMENT FINANCIAL* DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KESIAPAN ADOPSI PARIPURNA *INTERNATIONAL* *PUBLIC SECTOR ACCOUNTING* *STANDARDS*

Setu Setyawan¹, Ahmad Juanda^{2*}, Lia Candra Inata³

Affiliation:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: *The objective of this research to assess and analyze the role of government finance and economic growth in influencing the readiness of plenary adoption of IPSAS.*

Methodology/approach: *The sample in this study consisted of 198 research data from 33 provincial governments in Indonesia that sample criteria. The data of this study were analyzed using multiple regression analysis.*

Findings: *The results of the study found that low level of government finance expected to role in the readiness of IPSAS plenary adoption. Meanwhile, the economic growth rate that is getting better or worse can influence the informer to disclose information in accordance with the elements of IPSAS.*

Practical implications: *This research contributes to provincial governments and policymakers to better support the implementation of accrual-based IPSAS and is used guide for policymakers in determining whether plenary adoption is relevant so as to create value for public entities, especially public sector organizations.*

Originality/value: *Regarding IPSAS, there has been no empirical research that analyzes the readiness of IPSAS plenary adoption with economic growth factors that play a role in IPSAS adoption readiness. So this needs to be done research that leads to the readiness of IPSAS adoption in full with factors that influence it.*

KEYWORDS: *Economic Growth; Government Financial; IPSAS; Plenary Adoption.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran government financial dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi kesiapan adopsi paripurna IPSAS.

Metode/pendekatan: Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 198 data penelitian dari 33 Pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil: Hasil penelitian menemukan tingkat rendahnya government financial mengindikasikan pemerintah untuk mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS yang diharapkan menjadi peran untuk kesiapan adopsi paripurna IPSAS. Sedangkan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau buruk dapat mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan elemen-elemen IPSAS.

Implikasi praktik: Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah provinsi dan pembuat kebijakan dalam strategi akuntansi mereka untuk lebih mendukung implementasi IPSAS berbasis akrual dan digunakan sebagai petunjuk bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan apakah adopsi paripurna relevan sehingga dapat menciptakan nilai bagi entitas-entitas publik terutama organisasi sektor publik.

Orisinalitas/kebaharuan: Mengenai IPSAS, belum ada penelitian secara empiris yang menganalisis kesiapan adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang menjadi peran dalam kesiapan adopsi IPSAS. Sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian yang mengarah ke kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna dengan faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Adopsi Paripurna; Government Financial; IPSAS; Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), setara dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IPSAS mengatur proses akuntansi keuangan pada sektor pemerintah (Ingrams et al., 2020). Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional sendiri bermula ketika adanya kesadaran akan manfaat nyata dari informasi akuntansi keuangan yang masih konsisten dan tidak terbandingkan (*comparable*) pada lintas yurisdiksi. Sistem akuntansi anggaran tradisional di sektor publik dianggap sebagai kerangka kerja yang tidak tepat untuk menghadapi tantangan *new public management* (Zhang et al., 2021), sehingga banyak negara memulai perubahan struktural dalam sistem akuntansi, tak terkecuali negara Indonesia. Dengan memperkenalkan gagasan akrual sebagai inovasi dalam akuntansi pemerintah (Gómez-Villegas et al., 2020).

Pergerakan basis kas ke basis akrual dan pengembangan standar sektor publik yang diakui IPSAS dianggap sebagai salah satu inovasi utama dalam praktik akuntansi pemerintah berdasarkan apa yang umumnya dikenal sebagai *New Public Financial Management* (NPFM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, (2021) mencatat bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang lebih baik tentang solvabilitas pemerintah dan lebih banyak digunakan untuk menentukan biaya pelayanan publik. Pengusellangkapan informasi akrual dalam pelaporan keuangan dewasa ini dianggap sebagai praktik terbaik dalam penyajian informasi keuangan untuk menilai kinerja organisasi atau entitas, tak terkecuali organisasi pemerintah.

Perkembangan akuntansi pemerintah berbasis akrual di Indonesia sendiri diawali reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang di bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Makki & Lodhi, 2009). Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum (Biduri, 2018). Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) saat ini menjadi fokus transformasi di seluruh dunia dalam akuntansi sektor publik (Baskerville & Grossi, 2019). Upaya kongkrit yang dilakukan oleh Dewan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan melakukan konvergensi Standar Akuntansi Pemerintahan NKRI kepada IPSAS. Sejalan dengan tren globalisasi di seluruh dunia, Indonesia juga menyetujui adopsi IPSAS Paripurna pada tahun 2025. Hal ini memicu kesiapan pemerintah provinsi mengimplementasikan Adopsi Paripurna IPSAS ini akan terus timbul (Abdulkarim et al., 2020). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju Adopsi Paripurna IPSAS akan membawa dampak/implikasi. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah provinsi mengimplementasikan adopsi IPSAS paripurna ini akan terus timbul.

Perubahan menuju Adopsi Paripurna IPSAS organisasi untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan publik semakin baik (Bergmann et al., 2019). Kualitas laporan keuangan dapat dicerminkan dalam opini auditor untuk setiap entitas pelaporan (Lisa & Halim, 2023). Hal tersebut ditunjukkan adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan kualitas Laporan Keuangan meningkat dari tahun ke tahun karena kenaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga mendorong pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mematuhi standar akuntansi publik (SAP) yang berlaku. SAP yang ditetapkan oleh DSAK belum sepenuhnya mengadopsi IPSAS secara penuh sehingga belum adanya ketentuan mengenai syarat minimum pelaporan laporan yang mematuhi elemen-elemen IPSAS. Hal ini salah satu faktor peneliti untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kesiapan adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah provinsi di Indonesia.

Penelitian terkait kesiapan adopsi paripurna IPSAS di Indonesia masih sangat minim. Beberapa peneliti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait transisi ke standar IPSAS dan pengaruhnya pada faktor kelembagaan, kontinjensi, dan jaringan ekonomi yang dilakukan oleh Amiri & Hamza, (2020) menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan koersif

dan mimetik secara positif mempengaruhi adopsi IPSAS. Mnif & Gafsi, (2020) terkait pengungkapan akuntansi pemerintah pusat berdasarkan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) mengungkapkan pengaruh positif dari tingkat keterbukaan pemerintah (budaya politik), kualitas administrasi publik dan manajemen dan pengalaman sebelumnya dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS)/Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) di sektor publik, sedangkan kondisi keuangan pemerintah merupakan faktor yang tidak signifikan. Mengenai IPSAS, belum ada penelitian secara empiris yang menganalisis kesiapan adopsi paripurna IPSAS untuk entitas pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang menjadi peran dalam kesiapan adopsi IPSAS. Adopsi paripurna IPSAS pada tahun 2025 menjadi upaya dalam organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan dorongan bagi organisasi untuk mengikuti aturan yang berkembang, sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian yang mengarah ke kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna dengan faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini berkontribusi pada dalam dua cara. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori stakeholder. *Stakeholder theory* mengasumsikan bahwa eksistensi organisasi memerlukan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, sehingga aktivitas organisasi juga mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan (Pessôa et al., 2020). Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Donaldson & Preston, 2020). Sehingga dengan adanya perubahan menuju adopsi Paripurna IPSAS berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Kedua, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai petunjuk bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan bentuk adopsi IPSAS sehingga dapat menciptakan nilai bagi entitas-entitas publik.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator dalam kesiapan adopsi paripurna IPSAS, diantaranya *government financial* dan pertumbuhan ekonomi. *Government financial* dalam konteks *fiscal crisis*, yaitu kondisi dimana pemerintah mengalami kesulitan cukup besar dalam meningkatkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan atau adanya kendala keuangan (Nemec & Špaček, 2020). Kendala keuangan dan peningkatan dalam tingkat utang merupakan stimulus nyata bagi beberapa pemerintah untuk menunjukkan manajemen keuangan yang sehat kepada publik dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lebih informatif (McAdam et al., 2019). Alshbili & Elamer, (2020) berpendapat bahwa ketika ada utang yang beredar, pejabat pemerintah lebih diberi insentif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan keuangan untuk mengurangi biaya utang. Untuk meningkatkan dan kuantitas pelaporan keuangan, organisasi perlu mematuhi standar pelaporan yang diakui seluruh negara. Pemahaman akuntansi dan fungsi utamanya sebagai aparat pemerintah berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi dengan kondisi keuangan yang buruk akan mendorong organisasi untuk menerapkan standar pelaporan yang berlaku.

Kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien merupakan salah satu dari kondisi keuangan pemerintah (Ritonga et al., 2017). Apabila pemerintah daerah provinsi mengalami kesulitan cukup besar dalam meningkatkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan. Kendala keuangan dan peningkatan dalam tingkat utang merupakan stimulus nyata bagi beberapa organisasi untuk menunjukkan manajemen keuangan yang sehat kepada publik dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lebih informatif (Luder, 1992). Cheng, (1992) berpendapat bahwa ketika ada utang yang beredar, pejabat pemerintah lebih diberi insentif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan keuangan dan organisasi akan terdorong untuk mematuhi perkembangan peraturan yang yang berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah provinsi dengan kondisi keuangan yang kurang baik maka akan meningkatkan pelaporan keuangan dan akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna. Organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan *intellectual* organisasi, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau diakui oleh *stakeholder*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mnif & Gafsi, (2020) mengungkapkan terdapat hubungan positif antara *Government Financial* terhadap Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Hal ini diyakini bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menerbitkan utang publik dan adanya tekanan eksternal yang diberikan oleh pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang lebih relevan dan transparan untuk memfasilitasi akses ke *credit market* di masa depan dan untuk menjaga biaya utang turun. Penelitian Boolaky et al., (2020) terkait Adopsi IPSAS (*accrual accounting*) di Pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan (koersif, mimetik dan normatif) mempengaruhi kecepatan adopsi IPSAS. Rata-rata, banyak kotamadya dan kota membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi IPSAS (*accrual accounting*). Waktu dan frekuensi rapat dewan, hibah pemerintah, perwakilan oposisi di dewan, tekanan dari Kantor Audit dan keyakinan praktik keagamaan adalah pendorong kecepatan akrual IPSAS di pemerintah daerah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Government Financial* berpengaruh positif terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pertumbuhan yang cepat akan berdampak pada hasil kinerja perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi juga akan memberikan nilai tambah bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak positif secara signifikan terhadap keputusan organisasi untuk memilih bentuk IPSAS secara akrual (Amiri & Hamza, 2020). Pemerintah akan berusaha memberikan informasi yang positif kepada para investor potensial melalui pengungkapan yang terurai dalam laporan tahunan entitas untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mengikuti ketentuan *international best practices* dan diharapkan akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS (Alshujairi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Amiri & Hamza, (2020) terkait transisi ke standar IPSAS dan pengaruhnya pada faktor kelembagaan, kontinjensi, dan jaringan ekonomi, menunjukkan bahwa tekanan kelembagaan koersif dan mimetik secara positif

mempengaruhi adopsi IPSAS. Tata kelola ekonomi yang baik berdampak signifikan pada adopsi IPSAS sedangkan kedekatan hubungan ekonomi dengan mitra internasional mendorong negara-negara untuk mengadopsi IPSAS basis akrual yang dimodifikasi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *explanatory research* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *Government Financial* dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2016 – 2021. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan kualitas dan dapat dinyatakan cukup baik memenuhi kriteria berdasarkan standar pemerintahan yang berlaku. Namun, masih terdapat LKPD yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemerintah daerah provinsi belum menerapkan elemen-elemen IPSAS ke dalam *Annual Report*. Sehingga, acuan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna. Pemilihan sampel untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan metoda *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria untuk mendapatkan sampel. Kriteria pemerintah daerah provinsi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah provinsi menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016-2021.
2. Pemerintah daerah memiliki data lengkap.
3. Informasi keuangan pemerintah daerah tersedia untuk publik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tingkat Kesiapan Adopsi IPSAS

Tingkat Kesiapan Adopsi IPSAS diukur dengan mengembangkan daftar periksa pengungkapan IPSAS yang dibangun berdasarkan penelitian oleh (Ernst & Young, 2013). Berdasarkan aturan IFAC, IPSAS terdiri dari pengungkapan umum dan dasar yang harus disediakan dalam keuangan berbasis akrual. IPSAS tidak sepenuhnya diadopsi untuk semua negara. Di Indonesia terkait IPSAS, pemerintah memilih untuk melakukan harmonisasi terhadap IPSAS, sehingga dalam penelitian untuk mengukur kesiapan adopsi IPSAS secara paripurna dengan indeks pengukuran pengungkapan persyaratan minimum untuk informasi yang akan diungkapkan dalam keuangan pemerintah daerah provinsi Indonesia yaitu berfokus pada pengungkapan IPSAS 1 dan 2 untuk menilai kesiapan pemerintah daerah provinsi.

Daftar periksa penelitian ini terdiri dari 77 item pengungkapan dari standar berbasis akrual sebagaimana pada tabel 1.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan elemen-elemen *framework* yang sudah disebutkan pada komponen penilaian kesiapan adopsi IPSAS. Jika laporan pemerintah provinsi melampirkan informasi dari masing-masing elemen diatas maka diberi poin 1 untuk masing-masing elemen tersebut dan jika tidak melampirkan maka diberi poin 0 dan dijumlahkan seberapa besar pemerintah provinsi sudah menerapkan elemen IPSAS dan dibagi dengan jumlah elemen dari indikator IPSAS yang seharusnya dilaporkan. Semakin

89	Nbr. Item Menurut Standar	<i>Disclosure Category</i>	Nbr. Item Berdasarkan Kategori Pengungkapan
		1. Pengungkapan Umum	9
		2. Laporan Posisi Keuangan	15
		3. Laporan Kinerja Keuangan	11
59		4. Pernyataan perubahan aset/ekuitas bersih	7
		5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	17
		1. Penyajian laporan arus kas	3
		2. Informasi arus kas lainnya	8
18		3. Akuisisi entitas terkendali dan unit operasi lainnya	4
		4. Komponen kas dan setara kas	3

Tabel 1.
Konten daftar periksa

besar jumlah elemen yang dilampirkan dalam annual report pemerintah daerah provinsi maka pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa sudah siap untuk menerapkan IPSAS

Government Financial

Ritonga, (2015) membangun model pengukuran berdasarkan pernyataan bahwa kondisi keuangan pemda merupakan efek keuangan dari kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan. Terdapat enam dimensi yang dikembangkan, yaitu: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, dan solvabilitas tingkat layanan. Masing-masing tahapan perhitungan akan dilakukan Pembobotan Indikator Kondisi Keuangan Pemda dengan kategori apabila Pemda memiliki nilai kondisi rendah maka diberi nilai 0 dan jika kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi tinggi diberi nilai 1, dengan rumus indeks kondisi keuangan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kondisi Keuangan} = \frac{\text{Total Indeks Dimensi}}{\text{Jumlah Dimensi}}$$

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro, J. (2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan per kapita (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut :

$$R = \frac{T(\text{PDBt} - \text{PDBt-1})}{\text{PDBt-1}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh *Government Financial* dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AI_{it} = \alpha + \beta_2 GF_{it} + \beta_4 PE_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

AI_{it} = Kesiapan Adopsi Paripurna IPSAS i pada periode t

α = Konstanta $\beta_3 \beta_4$

β = Koefisien Regresi

GF_{it} = *Government Financial* i pada periode t

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi i pada periode t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Kesiapan Adopsi Paripurna IPSAS yang diukur dari elemen-elemen IPSAS yang dimiliki pemerintah provinsi di Indonesia memiliki nilai-nilai rata-rata yang masih rendah berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang artinya pemerintah daerah provinsi harus meningkatkan pengungkapan berdasarkan elemen-elemen IPSAS untuk meningkatkan tingkat kesiapan adopsi IPSAS. Tingkat kesiapan pemerintah provinsi di Indonesia tertinggi pada provinsi Aceh dan terendah pada provinsi Banten. Rata-rata tingkat kesiapan adopsi IPSAS lebih tinggi dari hasil standar deviasi yang berarti bahwa penyebaran data untuk variabel kesiapan adopsi IPSAS cenderung terdistribusi secara normal. *Government financial* sebagai variabel independen pertama dalam penelitian ini memiliki nilai mean cukup rendah yang artinya rata-rata kondisi keuangan di pemerintah provinsi dapat dikatakan cukup rendah, maka kinerja keuangannya akan semakin baik. Sedangkan, nilai pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah provinsi memiliki nilai rata-rata tinggi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif.

	Kesiapan Adopsi <i>Government</i> IPSAS	<i>Financial</i>	Pertumbuhan Ekonomi
Mean	0.528	0.086	0.262
Maximum	0.746	1.000	9.526
Minimum	0.220	0.300	-0.148
Std. Dev.	0.178	0.081	0.438
Observation	198	198	198

Tabel 2.
Statistik
Deskriptif

N		198
Normal Parameters	Mean	0,000
	Std. Deviation	5.172
Most Extreme Differences	Absolute	0,063
	Positive	0,046
	Negative	-0,063
Test Statistic		0,063
Asymp. Sig.		0,099

Tabel 3.
Tabel Tests Of Normality

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Adapun nilai dari hasil pengujian asumsi klasik sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan kolmogrogorov analisis non parametik *Kolmogrov Smirnov Z (1-Sampe K-S)* menunjukkan bagian Sig. dengan nilai sebesar 0,099, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji asumsi multikolinearitas, menunjukkan nilai *tolerance* pada setiap model regresi yaitu lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF yakni kurang dari 10. Hasil ini membuktikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel independen dalam suatu model penelitian yang diambil.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji glejser menunjukkan nilai **signifikansi (Sig.)** untuk variabel **government financial sebesar 0,928, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,141.** Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas **lebih besar dari 0,05** maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa **tidak terjadi gejala heteroskedastisitas** pada model regresi.

Hasil Uji Autokolerasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas diketahui bahwa jumlah observasi (n) sebanyak 198, dengan 2 variabel independen, dalam tabel Durbin Watson terlihat bahwa nilai $dL = 1,797$, $dU = 1,835$, dan hasil dW sebanyak 1,919, sehingga $4-dU = 2,165$. Data dikatakan terbebas dari autokorelasi jika $dL < dW < 4-dU$, dari hasil tersebut $1,797 < 1,919 < 2,165$, sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Variabel	Persamaan 1		Keterangan
	Tolerance	VIF	
<i>Government Financial</i>	0,937	1,068	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pertumbuhan Ekonomi	0,994	1,006	Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5.
Hasil Uji
Glejser

Variabel	T	Sig.
<i>Government Financial</i>	-0,091	0,928
Pertumbuhan Ekonomi	-1,146	0,141

Tabel 6.
Hasil Uji
Autokolerasi

dL	4-dL	dU	4-dU	DW	Keterangan	
1,797	2,203	1,835	2,165	1,919	Tidak Autokolerasi	Terjadi

Uji Hipotesis

Hipotesis	Sig.	Coefficient	Keterangan
H1 : <i>Government Financial</i> berpengaruh positif terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> .	,037	Negatif	Tidak Terdukung
H2 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> .	,011	Positif	Terdukung

Tabel 7.
Ringkasan Hasil
Pengujian Uji t

PEMBAHASAN

Government Financial berpengaruh terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa *government financial* berpengaruh dengan arah yang negatif terhadap kesiapan adopsi paripurna IPSAS pemerintah provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *government financial* berpengaruh positif terhadap kesiapan adopsi Paripurna IPSAS pemerintah provinsi di Indonesia (H1) tidak terdukung. Artinya, tingkat rendahnya *government financial* mengindikasikan bahwa mempengaruhi pemerintah untuk mengungkapkan elemen-elemen IPSAS yang diharapkan. Dengan kata lain, apabila tingkat *government financial* rendah maka dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah provinsi semakin baik sehingga mendorong penyajian informasi-informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia semakin tinggi. Apabila pemerintah provinsi mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS tinggi maka pemerintah provinsi akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna. Selain itu, rata-rata kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang bervariasi sehingga menimbulkan kesadaran pemerintah daerah provinsi untuk mengungkapkan informasi (Ademola et al., 2020).

Penelitian ini juga didukung oleh data yang menunjukkan kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi yang rata-rata mengalami kondisi keuangan yang bervariasi. Hal tersebut mempengaruhi pemerintah daerah provinsi dalam mengungkapkan tingkat informasi

keuangan yang memenuhi syarat elemen IPSAS. Seperti provinsi Banten yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik, mengungkapkan informasi berdasarkan elemen IPSAS sebesar 66%. Hal tersebut juga terjadi pada provinsi kalimantan barat yang mengungkapkan informasi sebesar 37% menunjukkan kondisi keuangan yang kurang baik.

Penelitian ini mendukung teori stakeholders. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan *intellectual* organisasi, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau diakui oleh stakeholder. Sehingga, stakeholders memiliki informasi yang cukup mengenai keadaan organisasi. Kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi yang baik atau kurang baik dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mnif & Gafsi, (2020) yang mengungkapkan terdapat hubungan positif antara *Government Financial* terhadap Adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS). Hal ini diyakini bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menerbitkan utang publik dan adanya tekanan eksternal yang diberikan oleh pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang lebih relevan dan transparan untuk memfasilitasi akses ke *credit market*. Kendala keuangan dan peningkatan dalam tingkat utang pemerintah merupakan stimulus nyata bagi beberapa pemerintah untuk menunjukkan manajemen keuangan yang sehat kepada publik dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lebih informatif (Luder, 1992).

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dengan arah yang positif terhadap kesiapan adopsi paripurna IPSAS, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Adopsi Paripurna *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) (H2) terdukung. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah provinsi di Indonesia menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah provinsi untuk mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau buruk dapat mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan elemen-elemen IPSAS dan mempengaruhi tingkat kesiapan pemerintah provinsi untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan memberikan nilai tambah bagi pemerintah provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Dana yang dibutuhkan untuk menambah modal tersebut biasa disebut investasi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak positif secara signifikan terhadap keputusan negara-negara untuk memilih bentuk IPSAS secara akrual (Amiri and Hamza 2020).

Teori kelembagaan dapat memberikan kerangka kerja yang baik untuk terbentuknya organisasi, karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Menurut Philpott & Jadhav, (2019), organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar organisasi. Praktik penyusunan dan publikasi laporan tahunan ini kemudian menjadi berbeda karena masing-masing pemerintah memiliki logika yang berbeda yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dan kesiapan untuk mengikuti standar yang berbeda-beda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ogbuagu & Onuora, (2019) terkait efek Adopsi IPSAS yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Organisasi Sektor Publik Nigeria memiliki dampak signifikan dari penganggaran berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi maka dapat meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas terhadap tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, Organisasi sektor publik akan lebih patuh dan luas untuk mengungkapkan informasi berdasarkan standar internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan adopsi paripurna IPSAS. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat government financial yang rendah maka dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah provinsi semakin baik sehingga mendorong penyajian informasi-informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS dan pemerintah daerah provinsi diharapkan akan lebih siap untuk mengadopsi IPSAS secara paripurna. Sedangkan, tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah provinsi di Indonesia menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi berdasarkan elemen-elemen IPSAS. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau buruk dapat mempengaruhi pemberi informasi untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan elemen-elemen IPSAS dan menjadi faktor dalam kesiapan adopsi IPSAS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah literatur yang membahas mengenai tingkat kesiapan adopsi IPSAS di Indonesia relatif sedikit. Kedua, tidak semua pemerintah provinsi mengungkapkan informasi yang up to date tentang pertanggungjawaban keuangan. Sehingga berdasarkan keterbatasan penelitian ini, saran penelitian selanjutnya melakukan penelitian yang berkelanjutan mengenai dua variabel tersebut untuk melihat konsistensi hasil penelitian dan perlu dilakukan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mendalam.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah provinsi dan pembuat kebijakan dalam strategi akuntansi mereka untuk lebih mendukung implementasi Standar Akuntan Publik yang didasari IPSAS berbasis akrual, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta mencegah fraud di sektor publik dan regulator untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan apakah adopsi paripurna relevan sehingga dapat menciptakan nilai bagi entitas-entitas publik terutama organisasi sektor publik.

REFERENSI

- Abdulkarim, M. E., Umlai, M. I., & Al-Saudi, L. F. (2020). Exploring the role of innovation in the level of readiness to adopt IPSAS. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(3), 469–495. <https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2019-0119>
- Ademola, A. O., Ben-Caleb, E., Madugba, J. U., Adegboyegun, A. E., & Eluyela, D. F. (2020). International public sector accounting standards (IPSAS) adoption and implementation in Nigerian public sector. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 434–444. <https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N1P434>
- Alshbili, I., & Elamer, A. A. (2020). The influence of institutional context on corporate social responsibility disclosure: a case of a developing country. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 10(3), 269–293. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1677440>

- Alshujairi, M. (2014). Government Accounting System Reform and the Adoption of IPSAS in Iraq. *Research Journal of Finance and Accounting Wnm.Iste.Org ISSN*, 5(24), 2222–2847. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.662.3030&rep=rep1&type=pdf>
- Amiri, A., & Hamza, S. E. (2020). The transition to IPSAS standards: the extent of adoption and the influence of institutional, contingency and economic network factors. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 19(2), 215–251. <https://doi.org/10.24818/jamis.2020.02002>
- Baskerville, R., & Grossi, G. (2019). Glocalization of accounting standards: Observations on neo-institutionalism of IPSAS. *Public Money and Management*, 39(2), 95–103. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580894>
- Bergmann, A., Fuchs, S., & Schuler, C. (2019). A theoretical basis for public sector accrual accounting research: current state and perspectives. *Public Money and Management*, 39(8), 560–570. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1654319>
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue 25). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Boolaky, P. K., Mirosea, N., & Omoteso, K. (2020). The Adoption of IPSAS (Accrual Accounting) in Indonesian Local Government: A Neo-Institutional Perspective. *International Journal of Public Administration*, 43(14), 1252–1265. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669047>
- Cheng, R. H. (1992). An empirical analysis of theories on factors influencing state government accounting disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 11(1), 1–42. [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(92\)90013-N](https://doi.org/10.1016/0278-4254(92)90013-N)
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. *Public Money and Management*, 41(2), 107–117. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1724665>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. E. E. (2020). *The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts , Evidence , and Implications Author (s): Thomas Donaldson and Lee E . Preston Source : The Academy of Management Review , Vol . 20 , No . 1 (Jan . , 1995) , pp . 65-91 Published by : Academy of Manag.* 20(1), 65–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Ernst, & Young. (2013). Value of Sustainability Reporting. *Boston College Carroll School Of Management.*, 1–15. www.BCCorporateCitizenship.org
- Gómez-Villegas, M., Brusca, I., & Bergmann, A. (2020). IPSAS in Latin America: innovation, isomorphism or rhetoric? *Public Money and Management*, 40(7), 489–498. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1769374>
- Ingrams, A., Manoharan, A., Schmidhuber, L., & Holzer, M. (2020). Stages and Determinants of E-Government Development: A Twelve-Year Longitudinal Study of Global Cities. *International Public Management Journal*, 23(6), 731–769. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987>
- Lisa, O., & Halim, A. (2023). Konstruksi Model Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23074>

- Luder, K. (1992). *A contingency model of governmental accounting innovations in the political administrative environment*. 7, 99–127.
- Makki, M. . M., & Lodhi, S. A. (2009). Impact of intellectual capital on return on investment in Pakistani corporate sector. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 3(3), 2995–3007. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.967820>
- McAdam, R., Miller, K., & McSorley, C. (2019). Towards a contingency theory perspective of quality management in enabling strategic alignment. *International Journal of Production Economics*, 207, 195–209. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.07.003>
- Mnif, Y., & Gafsi, Y. (2020). A contingency theory perspective on the analysis of central government accounting disclosure under International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). *Meditari Accountancy Research*, 28(6), 1089–1117. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2019-0480>
- Nemec, J., & Špaček, D. (2020). The Covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 837–846. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0109>
- Ogbuagu, N. ., & Onuora, J. K. . (2019). Effect of IPSAS Adoption on Accountability and Transparency in the Nigerian Public Sector Organizations. *Journal of Accounting and Financial Management*, 5(3), 65–80. <https://doi.org/10.5897/JAT2019.0345>
- Pessôa de Melo, V., Taumaturgo, Í., De Oliveira Santos Jhuniior, R., & Torres Uchôa, M. (2020). The Concept of Justice in Stakeholder Theory: A Systematic Literature Review. *BASE - Revista de Administração e Contabilidade Da Unisinos*, 17(3), 429–455. <https://doi.org/10.4013/base.2020.173.03>
- Philpott, C. C., & Jadhav, S. (2019). The ins and outs of iron: Escorting iron through the mammalian cytosol. *Free Radical Biology and Medicine*, 133, 112–117. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.10.411>
- Rahmawati, E., Sonita, S., Nur, A. W., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government'S Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jieb.v29i2.6206>
- Ritonga, I. T., Suhartono, E., & Purbaya, D. (2017). *Akuntansi keuangan pemerintah daerah pengantar* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Untoro, J. (2010). *Ekonomi Makro*. Jakarta : Kawah Media.
- Zhang, X., Tantardini, M., Kim, Y., & de Lancer Julnes, P. (2021). Is Performance Management Reform Living up to its Expectations? An Analysis of Public Management Reform in China's Guangdong Province. *Public Performance and Management Review*, 44(1), 81–107. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1806085>